

Dr. Muh. Sudirman, S.Ag. M.Pd



FILSAFAT PANCASILA

Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi
dalam Kehidupan Berbangsa

FILSAFAT PANCASILA

**Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi
dalam Kehidupan Berbangsa**

Dr. Muh. Sudirman, S.Ag. M.Pd



FILSAFAT PANCASILA
Ontologi, Epistimologi dan Asiologi dalam Kehidupan Berbangsa

Penulis:
Dr. Muh. Sudirman, S.Ag. M.Pd

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-246-663-6

Cetakan Pertama:
Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Filsafat Pancasila: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Kehidupan Berbangsa” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambahan wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Filsafat Pancasila.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Urgensi Penulisan Buku	1
B. Tujuan Penulisan Buku	2
C. Relevansi Akademik dan Praktis.....	2
D. Peta Konsep Buku Ajar Filsafat Pancasila	4
E. Sistematika Buku.....	4
BAB 2 KONSEP DASAR FILSAFAT	7
A. Pengertian dan Hakikat Filsafat	7
B. Objek dan Ruang Lingkup Filsafat	8
C. Filsafat, Ilmu Pengetahuan, dan Agama.....	8
D. Fungsi dan Manfaat Filsafat dalam Kehidupan	10
E. Relevansi Konsep Filsafat bagi Kajian Pancasila	13
BAB 3 PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA	19
A. Konsep Pandangan Hidup Bangsa	20
B. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa	21
C. Landasan Filosofis Pancasila	23
D. Landasan Sosiologis dan Historis Pancasila	25
E. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sistem Nilai Kehidupan	27
F. Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup	29
G. Relevansi Pancasila di Era Globalisasi	31
BAB 4 PANCASILA DITINJAU DARI SEGI PENGETA-HUAN ILMIAH ..	35
A. Pengertian Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan	35
B. Hubungan Pancasila dengan Ilmu Pengetahuan	37
C. Pancasila sebagai Sistem Pengetahuan Ilmiah	39
D. Metode Pengkajian Pancasila Secara Ilmiah	41
E. Relevansi Pancasila sebagai Ilmu	

dalam Kehidupan Akademik	43
BAB 5 PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM INDONESIA	47
A. Pengertian Sumber Tertib Hukum	47
B. Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	49
C. Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee)	52
D. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dan Sistem Perundang-undangan	54
E. Implementasi Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum	56
BAB 6 PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA	61
A. Konsep Jati Diri Bangsa.....	61
B. Pancasila sebagai Identitas dan Kepribadian Bangsa.....	63
C. Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia	66
D. Tantangan terhadap Jati Diri Bangsa di Era Globalisasi	68
E. Strategi Penguatan Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa	70
BAB 7 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.....	75
A. Pengertian Sistem dan Filsafat	75
B. Pancasila sebagai Sistem Filsafat yang Integral	77
C. Kesatuan dan Koherensi Antar Sila Pancasila	79
D. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Kehidupan Berbangsa.....	81
E. Tantangan Implementasi Sistem Filsafat Pancasila	82
F. Rangkuman	84
BAB 8 PANCASILA DALAM KAJIAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS	87
A. Pengertian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi	88
B. Pancasila dalam Kajian Ontologis	90
C. Pancasila dalam Kajian Epistemologis	93
D. Pancasila dalam Kajian Aksiologis	96
E. Integrasi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pancasila.....	98

BAB 9 FILSAFAT PANCASILA DALAM

PEMBEN-TUKAN KARAKTER BANGSA 103

- A. Konsep Karakter Bangsa dalam Perspektif Filsafat104
- B. Nilai-nilai Filsafat Pancasila sebagai
Fondasi Karakter Bangsa107
- C. Filsafat Pancasila dan Pendidikan Karakter110
- D. Tantangan Pembentukan Karakter Bangsa
di Era Kontemporer.....113
- E. Strategi Aktualisasi Filsafat
Pancasila dalam Pembentukan Karakter116

GLOSARIUM 121

TENTANG PENULIS 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENULISAN BUKU

Filsafat Pancasila menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara yang bersifat konstitusional, tetapi juga sebagai sistem nilai dan pemikiran filosofis yang menjiwai seluruh aspek kehidupan nasional, mulai dari bidang politik, hukum, pendidikan, ekonomi, hingga kebudayaan. Namun demikian, dalam praktik kehidupan kontemporer, pemahaman terhadap Pancasila sering kali mengalami penyempitan makna, sekadar dihafal sebagai rumusan lima sila tanpa penghayatan filosofis yang mendalam. Kondisi ini menimbulkan jarak antara nilai ideal Pancasila dan realitas sosial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Latar belakang penulisan buku ajar ini berangkat dari kebutuhan akademik dan praktis untuk menghadirkan kajian Filsafat Pancasila yang sistematis, komprehensif, dan kontekstual. Di lingkungan perguruan tinggi, mata kuliah Filsafat Pancasila sering kali diposisikan sebagai mata kuliah normatif, sehingga kurang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan filosofis. Akibatnya, Pancasila belum sepenuhnya dipahami sebagai sistem filsafat yang hidup dan relevan dengan persoalan-persoalan aktual bangsa, seperti krisis moral, degradasi karakter, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, serta tantangan globalisasi dan modernisasi.

Urgensi penulisan buku ini semakin kuat ketika dihadapkan pada realitas perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta penetrasi nilai-nilai asing membawa dampak signifikan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dalam situasi demikian,

BAB II

KONSEP DASAR FILSAFAT

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa lahir dari proses pemikiran dan refleksi yang mendalam terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam konteks sosial, budaya, dan spiritualnya. Oleh karena itu, Pancasila tidak cukup dipahami secara normatif atau yuridis semata, tetapi perlu dikaji sebagai hasil pemikiran filosofis yang memuat pandangan tentang manusia, masyarakat, dan nilai kehidupan. Dalam hal ini, filsafat berperan sebagai sarana refleksi kritis untuk memahami makna Pancasila secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Bab ini membahas konsep dasar filsafat sebagai landasan berpikir dalam memahami Pancasila, meliputi pengertian filsafat, ruang lingkup kajiannya, serta perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendekatan reflektif dan kritis digunakan untuk menghindari pemahaman Pancasila yang bersifat dogmatis, serta menempatkannya sebagai sistem nilai yang hidup dan terbuka terhadap penafsiran. Dengan kerangka ini, Bab II menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya, sehingga Pancasila dapat dipahami tidak hanya sebagai warisan historis, tetapi juga sebagai landasan intelektual dan moral yang terus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT FILSAFAT

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, yang terdiri atas kata *philo* (cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan). Secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Dalam pengertian terminologis, filsafat dipahami sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang paling hakiki mengenai realitas, pengetahuan, dan nilai melalui proses berpikir yang rasional, kritis, dan mendalam (Bertens, 2001).

BAB III

HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Setelah membahas konsep dasar filsafat sebagai cara berpikir yang kritis dan reflektif, pembahasan selanjutnya diarahkan pada pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat tidak hanya berbicara pada tingkat konsep yang abstrak, tetapi menjadi bermakna ketika terkait dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan hasil refleksi filosofis yang bersumber dari pengalaman sejarah dan kebudayaan bangsa, serta berfungsi sebagai pedoman dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bersama.

Bab ini membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan menempatkannya sebagai sistem nilai yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan filosofis, sosiologis, dan historis Pancasila, serta perannya dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Melalui pendekatan yang reflektif dan kritis, Pancasila dipahami sebagai nilai yang hidup dan terus berkembang, sehingga dapat diaktualisasikan secara kontekstual dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan tantangan global tanpa kehilangan makna dasarnya sebagai pandangan hidup bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2013). *Pengantar filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekarno. (1945). *Lahirnya Pancasila (Pidato 1 Juni 1945)*. Jakarta: BPUPKI.
- Soekarno. (2005). *Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Media Pressindo.
- Suriasumantri, J. S. (2010). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yamin, M. (1959). *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca.

BAB IV

PANCASILA DITINJAU DARI SEGI PENGETAHUAN ILMIAH

Setelah Pancasila dibahas sebagai pandangan hidup bangsa yang bersumber dari nilai budaya, sejarah, dan kepribadian nasional, bab ini mengarahkan perhatian pada dimensi pengetahuan Pancasila. Menempatkan Pancasila dalam kerangka pengetahuan ilmiah dengan melihatnya sebagai sistem pemikiran yang dapat dikaji secara rasional dan sistematis. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat normatif dan ideologis, tetapi juga memiliki dasar keilmuan yang relevan untuk dikembangkan dalam kajian akademik.

Bab ini membahas Pancasila dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, termasuk pengertian pengetahuan dan ilmu, serta posisi Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang memiliki objek kajian dan kerangka pemikiran yang utuh. Melalui pembahasan ini, Pancasila dipahami sebagai paradigma yang memberi arah nilai dan tanggung jawab moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

A. PENGERTIAN PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Pengetahuan (*knowledge*) merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Secara umum, pengetahuan dapat dipahami sebagai hasil dari proses interaksi manusia dengan realitas, baik realitas alam, sosial, maupun diri manusia sendiri. Proses ini berlangsung melalui pengalaman inderawi, pengamatan, pemikiran rasional, serta refleksi kritis terhadap apa yang dialami. Dengan pengetahuan, manusia mampu memahami dunia sekitarnya, menafsirkan pengalaman hidup, serta mengambil keputusan dalam berbagai situasi kehidupan (Bertens, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2013). *Pengantar filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bertens, K. (2013). *Pengantar filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suriasumantri, J. S. (2010). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Titus, H. H., Smith, M. S., & Nolan, R. T. (1984). *Living issues in philosophy*. New York: D. Van Nostrand Company.
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bertens, K. (2001). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bertens, K. (2013). *Pengantar filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V

PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM INDONESIA

Setelah Pancasila dikaji sebagai sistem pemikiran yang rasional dan bernilai, pembahasan selanjutnya diarahkan pada peran Pancasila dalam bidang hukum. Dalam negara hukum Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena menjadi sumber nilai dan norma yang menjiwai seluruh sistem hukum nasional. Pancasila berfungsi sebagai dasar yang memberikan arah dan tujuan bagi pembentukan serta penegakan hukum agar selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.

Bab V ini membahas Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia dengan menempatkannya sebagai norma dasar dan cita hukum. Pembahasan mencakup kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, hubungannya dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penegakan hukum. Melalui pembahasan ini ditegaskan bahwa hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar filosofis negara, sehingga Bab V menjadi penghubung antara kajian filsafat Pancasila dan pembahasan lanjutan mengenai jati diri bangsa serta Pancasila sebagai sistem filsafat.

A. PENGERTIAN SUMBER TERTIB HUKUM

Sumber tertib hukum merupakan landasan fundamental yang menjadi dasar keberlakuan, pembentukan, dan pengembangan hukum dalam suatu negara. Konsep ini tidak semata-mata menunjuk pada sumber formal hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, atau kebiasaan, melainkan mencakup pula sumber nilai dan prinsip dasar yang menjiwai keseluruhan sistem hukum. Dengan demikian, sumber tertib hukum memiliki kedudukan

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing.
- Radbruch, G. (1956). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi nasional, tetapi juga menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lahir dari sejarah, budaya, dan pengalaman hidup masyarakat Indonesia yang beragam. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai dasar yang telah lama hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai pandangan hidup bersama yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak bangsa Indonesia.

Sebagai jati diri bangsa, Pancasila berperan penting dalam menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Pancasila menjadi identitas kolektif yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, sekaligus menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup berhenti pada aspek simbolik atau hafalan semata, tetapi perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku nyata. Melalui pembahasan dalam bab ini, Pancasila akan dikaji sebagai jati diri bangsa yang harus terus dipahami, dihayati, dan diamalkan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan nasional dan global.

A. KONSEP JATI DIRI BANGSA

Jati diri bangsa merupakan konsep fundamental dalam memahami eksistensi suatu bangsa, baik dalam perspektif filosofis maupun sosiologis. Secara umum, jati diri bangsa dapat dipahami sebagai **identitas kolektif**

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Pancasila dapat dipahami tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki kesatuan dan keterpaduan makna. Setiap sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membentuk satu kesatuan nilai. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tersusun secara sistematis dan mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, Pancasila memiliki koherensi internal yang menjadikannya sebagai sistem pemikiran yang utuh dan konsisten.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan kerangka nilai dan dasar refleksi dalam memahami serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi antar sila menunjukkan bahwa penerapan satu sila tidak dapat dipisahkan dari sila lainnya, karena seluruhnya saling menjiwai dan memperkuat. Bab ini akan menguraikan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan menekankan keselarasan, koherensi, dan integrasi nilai antar sila, sehingga Pancasila dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam kehidupan nasional.

A. PENGERTIAN SISTEM DAN FILSAFAT

Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, sistem tidak sekadar kumpulan unsur, melainkan suatu kesatuan yang memiliki struktur, keteraturan, dan relasi

BAB VIII

PANCASILA DALAM KAJIAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS

Untuk memahami Pancasila secara lebih mendalam, diperlukan pendekatan filsafat yang menelaah hakikat, dasar pengetahuan, dan nilai yang dikandung di dalamnya. Dalam kajian filsafat, pendekatan tersebut dikenal sebagai kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, Pancasila dipahami sebagai sistem nilai yang berakar pada hakikat manusia dan kehidupan bangsa Indonesia. Secara epistemologis, Pancasila dikaji sebagai sumber pengetahuan dan kerangka berpikir yang lahir dari pengalaman historis dan kebudayaan bangsa. Sementara itu, secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, sikap, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bab ini membahas Pancasila dalam ketiga kajian tersebut untuk menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar rumusan normatif, tetapi merupakan sistem filsafat yang hidup dan aplikatif. Pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis membantu memperjelas kedudukan Pancasila sebagai dasar pemikiran yang rasional, bernilai, dan bermakna bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendalaman filsafat Pancasila diharapkan mampu memperkuat pemahaman kritis dan kesadaran nilai dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. (1998). *Metaphysics* (H. Tredennick & G. C. Armstrong, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bertens, K. (2013). *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Frondizi, R. (1971). *What Is Value? An Introduction to Axiology*. La Salle: Open Court.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suriasumantri, J. S. (2010). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Titus, H. H., Smith, M. S., & Nolan, R. T. (1984). *Living Issues in Philosophy*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2018). *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

BAB IX

FILSAFAT PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Filsafat Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran dan konsep, tetapi memiliki peran nyata dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip moral dan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun sikap, perilaku, dan kepribadian warga negara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai dasar yang relevan untuk menumbuhkan karakter bangsa yang beriman, berperikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, filsafat Pancasila perlu dipahami dan diinternalisasi secara sadar dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bab penutup, pembahasan ini menekankan aspek aplikatif dan reflektif dari filsafat Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Bab ini mengajak pembaca untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diwujudkan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa, sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di era modern. Dengan demikian, filsafat Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga menjadi kekuatan etis yang membentuk karakter bangsa Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. (1998). *Metaphysics* (H. Tredennick & G. C. Armstrong, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bauman, Z. (2007). *Consuming Life*. Cambridge: Polity Press.
- Bertens, K. (2013). *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Durkheim, É. (2014). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Frondizi, R. (1971). *What Is Value? An Introduction to Axiology*. La Salle: Open Court.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character*. New York: Bantam Books.
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suriasumantri, J. S. (2010). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Titus, H. H., Smith, M. S., & Nolan, R. T. (1984). *Living Issues in Philosophy*. New York: Van Nostrand Reinhold.

TENTANG PENULIS

Dr. Muh. Sudirman, S.Ag. M.Pd. Lahir di Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, 31 Desember 1971. Pendidikan diawali pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Parit Cahaya Desa Pengalihan Kec. Keritang Indra Giri Hilir Riau (1984), Madrasah Tsanawiyah I As'adiyah Pusat Sengkang Kab. Wajo (1987), Madrasah Aliyah Pusat Sengkang Kab. Wajo (1990). Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang (1996), Magister (S2) Universitas Negeri Makassar Konsentrasi Hukum dan Kewarganegaraan (2005), Program Doktorat (S3) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017). Publikasi Buku: Islam dan Budaya Lokal (Mengungkap Makna Filosofis Simbol-simbol Adat dalam Perkawinan) (2011), Etika Pergaulan Suami Istri (Suatu Pendekatan Budaya dan Syariat Islam). (2011), Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Tahun 2013, Hukum Kewarisan (Antara Teori dan Praktik) (2019), Hukum Adat (2019), Perkawinan Bugis: Antara Tradisi dan Syariat (2025). Hukum Adat Indonesia (2025). Penulis diangkat sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare tahun 1999, kemudian mutasi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Filsafat Pancasila merupakan landasan filosofis yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai fundamental yang bersumber dari kepribadian, budaya, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Dalam kajian filsafat, Pancasila dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Secara ontologis, Pancasila memandang hakikat realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat monodualis, yakni sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Manusia Indonesia diakui memiliki kedudukan yang setara, bermartabat, dan saling membutuhkan dalam kehidupan bersama. Hakikat keberadaan bangsa Indonesia tercermin dalam persatuan yang menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan hidup, sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila. Dari sudut pandang epistemologis, Pancasila menjadi sumber pengetahuan dan kebenaran yang diperoleh melalui perpaduan antara akal budi, pengalaman empiris, nilai moral, serta wahyu Ilahi. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan melalui musyawarah dan konsensus para pendiri bangsa dengan berlandaskan pada kearifan lokal dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman berpikir dalam pengambilan keputusan politik, hukum, dan sosial.

